

**PENGARUH PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi



Disusun Oleh :
KORNELIUS TONI JAFFRAY
NIM : 2019110241

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBUANA TUNGGA DEWI
MALANG
2023

RINGKASAN

Pajak hiburan merupakan salah satu dari Perpajakan daerah, perpajakan daerah memiliki potensi yang besar karena mengutamakan dukungan berbagai elemen, termasuk pembangunan dan industri pariwisata, dalam inisiatif pembangunan daerah. Pembangunan nasional yang metodis merupakan suatu strategi strategis dan sistematis yang digunakan dalam pelaksanaan upaya pembangunan daerah. Diperlukannya untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan inisiatif mendasar yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep pembangunan daerah sering digunakan untuk menganalisis keadaan dan pelaksanaan proyek pembangunan daerah yang semakin maju. Dari penelitian ini dilakukan bertujuan sebagaimana untuk menilai potensi dampak pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang periode 2018 hingga 2022. Dua puluh orang dipilih secara acak dari populasi untuk menyampaikan perkiraan dari Pendapatan Asli Daerah atau (PAD), dilaksanakan mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Digunakan aplikasi perangkat lunak SPSS versi 29 sebagai analisis statistik dalam penelitian ini. Dari temuan hasil analisis kuantitatif memperlihatkan bahwa Pajak hiburan yang merupakan variabel independen dan Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel dependen dari Pendapatan Asli Daerah berkorelasi positif satu sama lain. Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat pengaruh yang menguntungkan, namun tidak signifikan secara statistik. Karena pendapatan pajak hiburan mempunyai nilai t hitung (8399) yang mana lebih besar dari t tabel (1,124) dan yang signifikan nilai t hitung sebesar $0,004 < 0,339$ sehingga ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh pendapatan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pendapatan pada kota Malang tahun 2018-2022 mempunyai pengaruh yang menguntungkan. Penegasan tersebut dibuktikan dengan hasil dari uji T yang memperlihatkan penerimaan pajak hiburan mempunyai nilai t hitung sebesar 8,399.

Kata Kunci: Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut prinsip otonomi daerah dan merupakan negara kesatuan. Negara yang memiliki wilayah yang luas serta kepulauan yang banyak, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah, dan setiap dari daerah mempunyai hak dan tanggung jawab masing masing. Yang mana sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah mempunyai kewenangan mengurus urusannya sendiri dengan tujuan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah memerlukan sumber pendapatan untuk melaksanakan tanggung jawabnya di wilayah penyelenggaraan. Pemerintah daerah diberi wewenang lebih besar dalam mengelola dan membelanjakan pendapatan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Dana Federal yang Adil kepada Negara Bagian dan Subbagian Politik Lainnya. Mengingat kenyataan bahwa setiap daerah menghadapi tantangan yang berbeda-beda, pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sebaik mungkin. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan dan pemanfaatan kapasitas bawaan yang ada di setiap daerah. Pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah secara tepat diharapkan dapat memfasilitasi penyediaan layanan dan kesejahteraan bagi rakyat.

Pajak daerah memegang peranan penting dalam menghasilkan pendapatan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan daerah dan memfasilitasi pelayanan masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap tercapainya otonomi daerah. Melihat kejadian tersebut, terlihat jelas bahwa pajak dan retribusi yang memiliki peranan penting terkhusus dalam kemajuan suatu daerah, khususnya dalam menunjang pembangunannya.

Kota Malang sebagai wilayah otonomi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tak terkecuali pada penerapan konsep desentralisasi seperti halnya daerah lainnya. Juga dengan Pemerintah Kota Batu diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan

pemerintahan daerahnya sendiri, dengan tujuan utama memajukan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Untuk melaksanakan kewenangan yang dibebankan dari pemerintah pusat, diperlukannya aliran pendapatan yang bersumber dari hasil Pendapatan Asli Daerah dari Pemerintah Kota Malang. Kota yang terkenal dengan industri pariwisatanya bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan daerahnya sendiri, yang terutama diperoleh dari potensi pariwisata, khususnya melalui pajak daerah yang merupakan sumber utama pendanaan pemerintah daerah. Pesatnya perluasan hotel, restoran, dan tempat hiburan di seluruh Kota Malang didorong oleh semakin meningkatnya daya tarik kota ini sebagai tujuan wisata. Dengan Pembangunan Kota Malang Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan partisipasi yang signifikan akan penambahan (PAD) atau Pendapatan Asli Daerah, khususnya didapatkan dari pemungutan Pajak Daerah, terkhusus dari Pajak Hiburan. Menurut Willy dkk. (2013), kota Malang menawarkan beragam pilihan hiburan, mencakup berbagai atraksi wisata yang menawan dan populer. Atraksi-atraksi ini memberikan pengalaman menyenangkan bagi pengunjung dan menjadi daya tarik utama, relaksasi, dan kesempatan liburan yang cocok baik bagi individu maupun keluarga. Pengejaran sumber keuangan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah daerah. Tentu saja asal usul pendapatan daerah berasal dari pajak daerah; Namun, defisit pendapatan daerah muncul sebagai dampak berkurangnya penerimaan pajak akibat pandemi Covid-19. Evaluasi terhadap pendapatan daerah yang prospektif memerlukan penentuan informasi dan standar yang relevan secara matang. Kota Malang mencakup beragam entitas yang rentan terhadap pajak daerah, sesuai dengan pemahaman yang berlaku. Konsep pajak daerah dijelaskan dalam kaitannya dengan alokasinya untuk kegiatan rekreasi dan pertunjukan, yang dikategorikan dapat diakses oleh banyak orang untuk kesenangan.

Industri hiburan menghadirkan prospek yang signifikan, karena banyak orang memilih aktivitas rekreasi selama liburan atau waktu senggang, dengan hiburan menjadi pilihan utama mereka. Dalam arti luas, intervensi pemerintah dapat memberikan dukungan kepada pengusaha

yang bergerak di industri hiburan dan memfasilitasi promosi perusahaan tersebut. Apabila masyarakat dinilai sudah aktif melakukan transisi ke penilaian berbasis internet, maka pemerintah daerah berpotensi menggairahkan wisata hiburan sebagai sarana meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung ke daerah tersebut. Semakin besar jumlah pengunjung, semakin menguntungkan bagi penyedia jasa hiburan. Hal ini juga akan berdampak pada wajib pajak yang dibayarkan. Menurut kutipan jurnal (Indah et al., 2021), peningkatan tingkat pendapatan juga berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Dengan pemahaman mengenai perihal diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul '**PENGARUH PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MALANG**'

1.2 Perumusan Masalah

Dengan mengetahui latar belakang yang dapat dipaparkan diatas, maka peneliti mempunyai rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Malang. ?

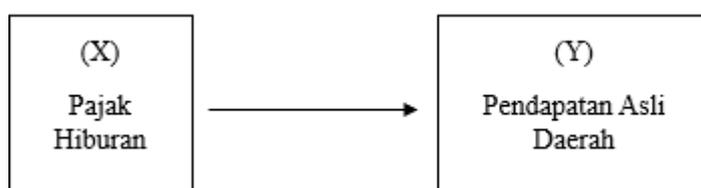
1.3 Tujuan Penelitian

Dalam pembahasan perumusan masalah diatas, dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk menjumpai pengaruh pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang.

1.4 Paradigma penelitian

Paradigma penelitian ini terdiri atas (X) pajak hiburan dan (Y) pendapatan asli daerah. Dan hal ini dapat digambarkan seperti di bawah ini:

Gambar 1.4



Sumber Data: Data diolah peneliti

Dari paradigma tersebut, maka dapat ditentukan rumusan masalah asosiatif/hubungan (satu)

1.5 Manfaat penelitian

1. Bagi Peneliti

Melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi, peneliti dapat memperoleh ilmu pendidikan selama masih kuliah dan terus mengembangkannya setelah lulus di masyarakat setempat.

2. Bagi Pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Malang

- a. Sebagai sarana pedoman dalam mengetahui penerimaan Pajak Hiburan di Kota Malang.
- b. Sebagai sarana untuk memperkuat hubungan yang positif antara instansi dengan Universitas Tribuana Tungadewi Malang

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Dalam penelitian selanjutnya dapat menjadi acuan dan masukan utamanya di bidang akuntansi perpajakan
- b. Agar dapat Menciptakan lulusan sarjana yang baik dan berkualitas bagi bangsa dan negara.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Pada kantor Bapenda Kota Malang penelitian ini dilakukan dan pengelola hiburan, Di gunakan variabel bebas (X) berupa Pajak Hiburan dan variabel terikat (Y) berupa pendapatan asli daerah pada penelitian ini. Populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 5 tahun dari tahun 2018 -2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriliani Kartika Sari, Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Kota Banjarmasin vol 3 no.1(2022)
- ARIF ZAKARIA,(2020). *Pengaruh Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Kota Malang Tahun 2015-2018 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Daerah Kota Malang)* (Doctoral dissertation, STIE MALANGKUCECWARA).
- Biringkanae, A., & Tammu, R. G. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, 4(1), 19-25.15:51
- Bria,Sulistiyowati,Y.,&Mukoffi,A.(2022). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Malang dimasa Covid 19* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi).
- D Riftiasari ,Analisis Perbandingan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Masa PSBB dengan PPKM Wilayah JABODETABEK .*Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 5206–5213 (2023)
- Dede, M. V., Indrihastuti, P. & Sulistiyowaty, Y. Dampak Covid-19 Terhadap Potensi Pajak Hiburan dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Batu). *J. Akunt.* 13, 344–351 (2021).
- Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016). *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 6(1).
- Firman Hadi Kusumo Yuwono.Analisis Potensi Dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).446-842(2011)
- Hidayat, I. & Marpaung,Tanggung Jawab Tertundanya Pembayaran Pajak Para Pelaku Usaha Tempat Hiburan Malam Dimasa Pandemic Covid-19. *J. Panor. Huk.* 6, 11–23 (2021).
- Ina Devi Wediyanti .Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)
- Indah, S. Et Al. Pengkajian Sumber Daya Manusia Terhadap tingkat Pajak Dalam Kepatuhan Membayar Pbb Pada Masa Pandemi Covid-19.7,105–114 (2021).
- Lawati,S.Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. *J. PPS UNISTI* 1, 40–56 (2018).
- Maulana,A.H.Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah). *Angew. Chemie Int. Ed.* 6(11), 951–952. 10–27 (2018).
- Mutiarin, D., Utami, S. & Damanik, J. New Normal Policy: Promosi Kebijakan Pariwisata Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Covid-19. *J. Kepariwisata Destn. Hosp. dan Perjalanan* 5, 20–33 (2021).
- Putri, L. E. D. (2022). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2016-2021* (Doctoral dissertation).
- Sujarweni, V. W. (2019). The Master Book of SPSS. *Anak Hebat Indonesia*.
- Sugiyono. (2018). Memahami Penelitian Kuantitatif. Bandung. Alfabeta
- Supriadi, Dwiatmanto & Karjo, S. Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Malang (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *J. Perpajak. (JEJAK)* 1, 1 (2015).

- Utama,Suartini, N. N. (2013). Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2, 44684.
- Wahyu Suci Rizqi Damayanti,Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (2020)
- Wahyuningsih, Soesilawati Soema Atmadja.Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Realisasi Pembayaran Pajak Daerah Di Kabupaten Sidoarjo . 1 ,318-322(2021).